BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wajah dunia masa depan adalah wajah perkotaan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk (urbanisasi) akan menyebabkan lebih dari setengah penduduk dunia mendiami daerah perkotaan. Konsentrasi penduduk dalam jumlah yang sedemikian besar, menjadi indikasi akan terjadinya ledakan berbagai persoalan kemanusiaan yang kompleks di daerah perkotaan (Khairuddin,1999). Proyeksi ini terutama akan mendominasi wajah perkotaan di negara-negara berkembang. Kombinasi faktor-faktor tingginya pertumbuhan penduduk alami, besarnya ketimpangan perkembangan desa dan kota, keterpurukan ekonomi dan konflik sosial politik menjadi penyebab utamanya.

Badai krisis ekonomi sejak beberapa tahun yang lalu telah menyebabkan kemunduran kondisi sosial dan ekonomi penduduk sampai ke titik terendah. Krisis ekonomi secara kewilayahan sangat berdampak terhadap dinamika di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Kondisi demikian dapat dimengerti karena daerah perkotaaan menjadi pusat berputarnya mesin-mesin pertumbuhan ekonomi (Soemardjan,1999). Konsentrasi penduduk yang tinggi sebagai implikasinya telah menyebabkan daerah perkotaan dipenuhi berbagai masalah sosial yang kompleks. Kondisi ini semakin meningkat intensitasnya, sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk akibat masih tingginya gelombang migrasi desa-kota. Akumulasi kondisi tersebut membuat degradasi kualitas hidup (lingkungan dan infrastruktur) perkotaan berlangsung semakin cepat. Pada akhirnya, wajah daerah perkotaan menjadi tidak ramah dan karenanya menyimpan sejumlah potensi kerawanan sosial. Isu perkotaan di Indonesia menjadi strategis seiring dengan perubahan mendasar baik di lingkup nasional, regional, maupun global. Fakih (1999) mengemukakan sedikitnya ada tiga hal utama yang patut dicermati yaitu krisis ekonomi *(economic crisis)*, reformasi politik *(political reform)*, dan globalisasi ekonomi *(economic globalization)*.

Krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi telah menyebabkan kemunduran berbagai kegiatan rakyat berupa terganggunya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Permasalahan tersebut telah membawa dampak pada meningkatnya pengganggguran dan jumlah penduduk miskin. Dalam konteks program penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan telah diyakini bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kata kunci keberhasilan program, sedangkan pemberdayaan disini lebih menekankan aspek peningkatan kemampuan intelektual dan emosional kelompok masyarakat miskin melalui proses belajar berwirausaha dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya. Untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi tersebut, pemerintah mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam bentuk program-program penyelamatan yang sifatnya darurat melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS), antara lain melalui Pemberdayaan dalam Mengatasi Dampak

Krisis Ekonomi (PDM-DKE), JPS SIWU *(Special Initiative for Women Unemployment)*, dan Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Sejak tahun anggaran 1999/2000 telah dilaksanakan program khusus yang didasarkan pada inpres nomor 5 tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan. Program khusus tersebut dikenal dengan program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang dimaksudkan untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, mempercepat, dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Dalam rangka pelaksanaan P2KP, salah satu kegiatannya adalah dengan memperkuat proses pembelajaran dalam Kelompok Belajar Swadaya Masyarakat (KSM). Pendekatan yang dianggap baru ini didasarkan pada pengalaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebelumnya dan dari hasil evaluasi tentang kekurangan, kelemahan, dan kesalahan yang terjadi. Paradigma baru yang mendasari kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah " *Pemberdayaan Masyarakat* " dengan *pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok*, yang merupakan hasil dari suatu *re-orientasi atau re-interpretasi* terhadap kebijaksanaan pembangunan, khususnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan pada wilayah-wilayah permukiman perkotaan.

Pemberdayaan sebagai dasar kebijaksanaan pembangunan mengandung pengertian *keberpihakan* kepada masyarakat yang lemah, tertinggal, dan tidak berdaya. Hal ini harus dipahami dan dimengerti oleh semua aktor pembangunan, baik

Pemerintah sebagai pemampu *(enabler)*, pelaku relawan, swasta dan masyarakat itu sendiri (subjek). Sedangkan konsep pembangunan yang diterapkan harus berdasarkan *kebutuhan nyata,* dan diarahkan untuk menembus atau mengakses sumber daya (modal, jasa, dan teknologi) melalui *keberdayaan sistem kelembagaan*, sehingga tercapai kondisi *berdayanya Sumberdaya Manusia dan Lingkungan, berdayanya Institusi Kelembagaan Lokal dan berdayanya Aspek Kewsahaan (ekonomi rakyat) yang bertumpu pada kelompok.*

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses perubahan sosio – kultur kelompok masyarakat dalam konteks penanggulangan kemiskinan bukanlah hal sederhana seperti membalikkan tangan saja, tetapi membutuhkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sehingga dapat diharapkan proses pemberdayaan ini dapat terwujud. Prasyarat – prasyarat tersebut adalah :

1. Adanya kesadaran bahwa kemiskinan itu bukanlah takdir atau suatu kondisi yang harus diterima apa adanya tanpa usaha untuk memperbaiki
2. Adanya kesadaran bahwa penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri baru kelompok masyarakat melalui perubahan " sikap social " meliputi mental, perilaku dan semangat atau etos kerja.
3. Adanya kesadaran bahwa berdaya dan mandiri adalah kunci utama penanggulangan kemiskinan,
4. Adanya kesepakatan pada anggota masyarakat bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus dimulai dengan " gerakan perubahan mental dan perilaku ".

B. Rumusan Masalah

Penduduk miskin pada umumnya memiliki banyak keterbatasan dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai factor, antara lain latar belakang pendidikan pada umumnya rendah, akses ke sumberdaya yang relatif terbatas, sikap mental yang cenderung fatalis dan lingkungan masyarakat yang terkooptasi oleh paradigma bahwa penduduk miskin adalah keniscayaan.

Dari sudut pandang lain, kemiskinan, ketiadaan pekerjaan, dan ketidakadilan merupakan cermin lemahnya keberdayaan diri, lemahnya penegakan hukum dan lemahnya individu dan juga masyarakat dalam mengendalikan kekuatan politik,ekonomi,social dan cultural yang berkembang dilingkungannya (Kindervater,1979:Kriesberg,1992:dan Horn,1997.), Untuk menjawab hal itu, konsep diri, kepercayaan diri, keberdayaan diri dan tanggung jawab diri perlu ditumbuhkan melalui Proses Pembelajaran.

Dengan mencermati kondisi demikian, maka penduduk miskin perlu didorong untuk meningkatkan keberdayaan dirinya melalui proses belajar, dan strategi yang tepat untuk terjadinya transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan penduduk miskin adalah melalui kelompok belajar.

Proses pembelajaran pada kelompok belajar dalam program penanggulangan kemiskinan adalah melalui wadah yang disebut Kelompok Belajar Swadaya Masyarakat (KSM), dan dirancang untuk diarahkan pada " kemandirian berusaha " penduduk miskin (anggota kelompok). Makna kemandirian berusaha bukanlah

semata – mata hanya dilihat dengan individu yang bekerja secara mandiri dan terlepas dari ketergantungan kelompok yang lain, melainkan juga kemandirian kelompok yang bersangkutan. Hal ini berkaitan erat dengan jenis usaha yang di kembangkan pada masing – masing kelompok. Ada usaha yang dijalankan secara sendiri – sendiri seperti kegiatan usaha menjual bakso, mie goreng dan solsepatu, ataupun yang dijalankan secara bersama - sama seperti dalam kelompok usaha pengelasan, peternakan dan bengkel kendaraan.

Proses pembelajaran yang terjadi dalam wadah KSM sifatnya pembelajaran yang terjadi secara alami dari dalam kelompok, artinya kelompok yang bersangkutan menentukan sendiri kebutuhan belajarnya, metoda pembelajarannya, media belajar yang digunakan, serta cara – cara yang ditempuh untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajarannya.

Berkenaan dengan proses pembelajaran ini, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana proses pembelajaran pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada Kecamatan Margacinta Kota Bandung

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses

pembelajaran yang terjadi pada Kelompok Belajar Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Pertanyaan umum ini selanjutnya dirinci kedalam pertanyaan – pertanyaan khusus yang digunakan sebagai acuan dalam mengeksplorasi temuan, sebagai berikut:

1. Bagaimana anggota Kelompok Belajar Swadaya Masyarakat (KSM) melakukan identifikasi kebutuhan balajar?
2. Bagaimana prosedur pengembangan materi dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran?
3. Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan?
4. Bagaimana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasinya?
5. Faktor pendukung maupun kendala apakah yang terjadi selama proses pembelajaran ?

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini berjudul studi tentang proses pembelajaran kelompok belajar swadaya masyarakat (KSM) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan, sedangkan kelompok sasaran yang diteliti adalah kelompok masyarakat yang berada dalam kategori dibawah garis kemiskinan dan diberdayakan melalui partisipasi masyarakat seutuhnya. Sehubungan dengan itu, untuk menghindari

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

kesalahan dan kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut.

1. Masyarakat miskin

Masyarakat miskin sebagai obyek program adalah kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi " ketidak berdayaan " karena serba kurang mampu, berpengasilan rendah, tingkat pendidikan dan kesehatannya rendah, dimana komponen dasar pengaruh tersebut berdampak negatif bagi rendahnya produktivitas.

2. Kelompok Belajar Swadaya Masyarakat

Kelompok belajar swadaya masyarakat (KSM) adalah suatu wadah dari sekelompok masyarakat " miskin " yang sepakat untuk secara bersama memberdayakan diri melalui proses belajar kemandirian berusaha. KSM sebagai kelompok calon penerima bantuan melalui P2KP bisa terdiri atas perorangan maupun kelompok dari keluarga miskin yang tinggal di wilayah perkotaan. Dalam implementasinya, baik dari awal pembentukan, perencanaan maupun pelaksanaannya pembelajarannya, KSM-KSM ini akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator kelurahan.

3. P2KP

Yang dimaksud dengan P2KP adalah program pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri. Program ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini

disiapkan institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat untuk menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi.

Sasaran penerima bantuan P2KP dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang diwadahi kelompok belajar swadaya masyarakat (KSM). Mekanisme dan bentuk bantuan yang diberikan P2KP adalah melalui usulan kegiatan di tingkat kelurahan yang dianggap memenuhi persyaratan, dan dengan bantuan berupa:

- Bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.
- Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan saran dasar lingkungan.
- Bantuan penciptaan kesempatan kerja , termasuk pelatihan untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya.

Dalam konteks KSM, kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota kelompok belajar baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian keberhasilannya.

Lokasi sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan permukiman kelurahan. Satuan permukiman mempunyai makna yang penting mengingat disinilah muncul kebersamaan dan kesepakatan atas dasar kepentingan yang sama. Selain itu, pada satuan-satuan permukiman terkonsentrasi pula berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan fisik dengan kepranataan sosialnya sendiri. Oleh

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

karenanya,satuan permukiman perlu dilihat sebagai areal yang memungkinkan adanya integrasi berbagai kegiatan, termasuk integrasi berbagai kegiatan pembangunan sektoral.

Satuan hunian dipilih berdasarkan kiteria sebagai berikut.

- Keberadaan satuan permukiman tidak terlepas dari fungsi-fungsi sekitarnya serta struktur fisik prasarana dan sarana yang merupakan bagian dari sistem struktur yang lebih besar. Oleh karena itu satuan permukiman perlu memperhatikan berbagai kondisi sosial, ekonomi, fisik, maupun fungsional.
- Seluruh kota (besar, sedang, kecil) dapat dijadikan lokasi sasaran P2KP. Namun untuk tahap pertama, lokasi sasaran dibatasi dan ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan data, dan pemetaaan kelurahan-kelurahan miskin yang berlokasi di kota.

4. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Pemberdayaan sendiri merupakan jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif, sedangkan pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan " akses ke " dan kontrol atas sumber – sumber hidup yang penting, maka gabungan antara makna partisipasi dan pemberdayaan menghasilkan pengertian " bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan masalah yang berkaitan dengan hakikat dari daya serta hubungan antar individu atau antar lapisan

sosial ". Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau breakdown hubungan antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan obyek . Secara garis besar proses ini melihat pentingnya aliran daya (flow of power) dari subyek ke obyek sehingga hasil akhir adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (baru) dan relasi sosial yang terjadi adalah antar subyek.

5. Fasilitator

Yang dimaksud dengan fasilitator adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan program P2KP di lapangan. Pendampingan diberikan kepada KSM dan BKM dari mulai pembentukan kelompok dan penyiapan usulan-usulan yang didahului dengan pengenalan potensi yang ada di masyarakat dalam kendala yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud peran disini adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat . Watak peran ini terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa dan dikemas dalam bentuk deskpripsi tugas pokok dan fungsi.

6. Dampak

Yang dimaksud dengan dampak dalam penelitian ini adalah perubahan sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat penerima program setelah dilaksanakannya program P2KP (khususnya program pembelajaran). Dampak sosial yang diteliti adalah sejauh mana konstribusi dari pelaksanakan program ini terhadap

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sasaran termasuk perubahan produktivitas kerjanya.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Faktor Pendukung dan Penghambat adalah suatu keadaan yang menyebabkan atau mempengaruhi proses pembelajaran atau tingkat penyerapan masyarakat sasaran sebagai warga belajar serta hasil yang dicapai dari suatu pemberdayaan masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan di kecamatan Margacinta Kota Bandung, baik yang bersifat mendukung (kekuatan, tantangan dan peluang) maupun yang bersifat penghambat (kelemahan) program.

E. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sangat menekankan pada peranan subyek program (dalam hal ini adalah masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok) untuk mampu " berdaya " dalam rangka melepaskan diri dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Dalam konteks ini, pendidikan luar sekolah sangat berperan dan memberikan konstribusi yang menentukan keberhasilan program.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengkaji proses pembelajaran pada kelompok belajar swadaya masyarakat (KSM) yang diterapkan dalam proses

pemberdayaan masyarakat di kecamatan Margacinta. Proses pembelajaran dalam penelitian ini diarahkan pada proses pembelajaran swaarah atau Self Directed Learning. Proses pembelajaran swaarah dimaksud sebagai proses pembelajaran yang menuntut anggota kelompok belajar proaktif dalam menentukan kebutuhan belajarnya, mengorganisasikan sumber – sumber belajar, cara belajar dan merefleksikan keberhasilan maupun kjegagalan yang dialaminya.

Pendidikan luar sekolah yang diterapkan pada proses pembelajaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan, menggunakan metoda "input – proses – output". Komponen atau unsur – unsur pendidikan luar sekolah yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran masyarakat miskin ini pada dasarnya sama dengan pendidikan sekolah hanya bedanya langsung terintegrasi ke dalam program pembangunan masyarakat, sedangkan ukuran keberhasilan dalam proses pembelajaran hanya dapat dilihat dari keluarannya (output) serta dampak pembelajarannya (outcome). Melihat gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang ada, maka penekanan penelitian ini adalah keterkaitan komponen PLS dalam proses pembelajaran dan factor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembelajaran baik dari sisi sumber belajar maupun warga belajar. Sistim pembelajaran yang diterapkan dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan secara umum dapat dilihat pada bagan alir dibawah ini.

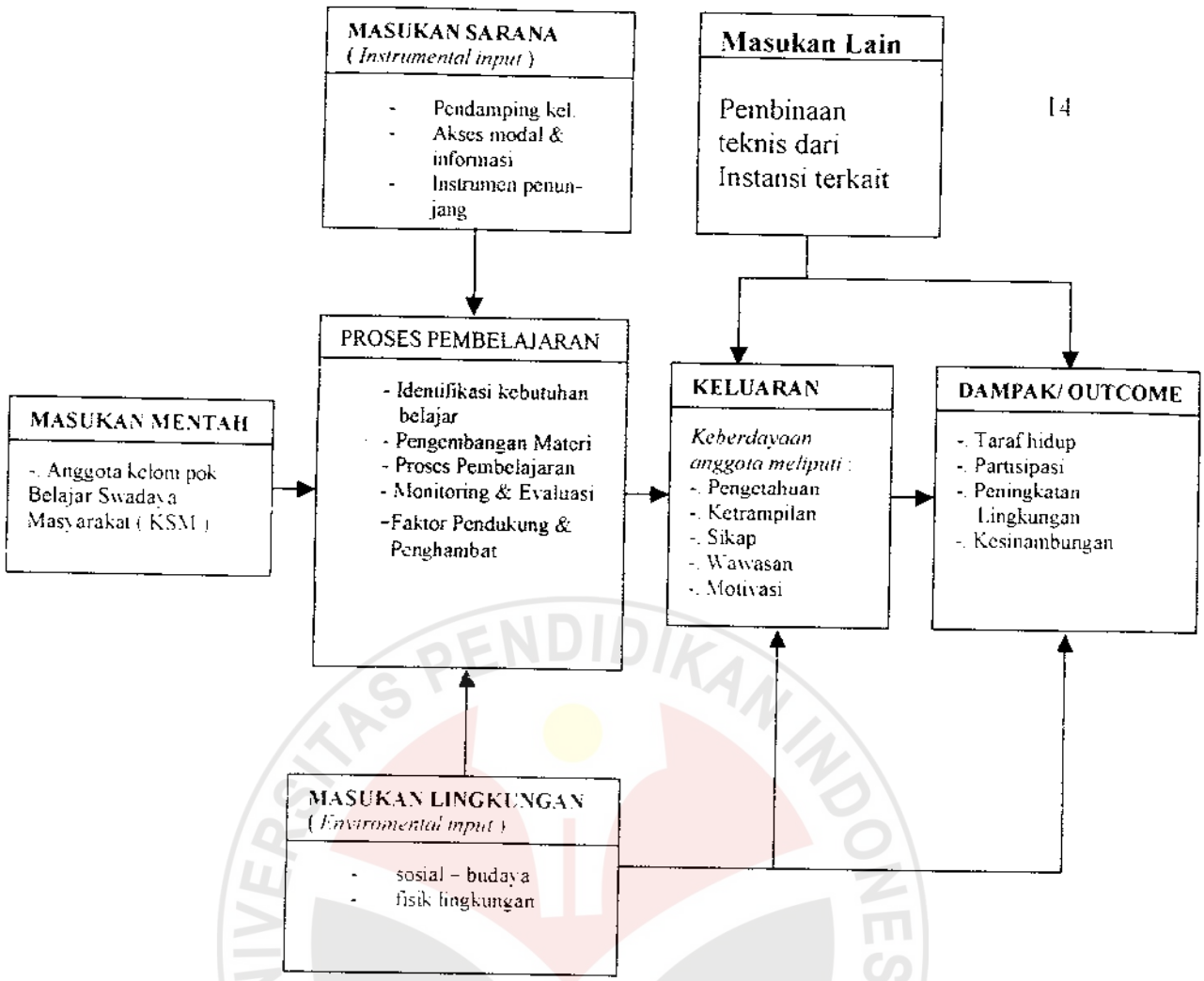

Gambar : Proses Pembelajaran

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran pada kelompok belajar swadaya masyarakat (KSM) sebagai upaya penanggulangan kemioskinan di daerah perkotaan.

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses identifikasi kebutuhan belajar di KSM
2. Mendeskripsikan prosedur pengembangan materi pembelajaran di KSM.
3. Mendeskripsikan proses pembelajaran yang terjadi di KSM

4. Mendeskripsikan proses Monitoring & Evaluasi
5. Mendeskripsikan factor pendukung dan penghambat yang terjadi selama proses pembelajaran di KSM

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara aspek guna laksana (secara praktis) maupun secara teoritis untuk kepentingan berbagai pihak.

1. Secara praktis :
   a. Hasil dan saran-saran dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program P2KP khususnya di Kota Bandung.
   b. Hasil dan saran-saran dari studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam upaya mewujudkan keberhasilan Program P2KP.
2. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dan saran-saran dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengkaji dan mengungkap konsep-konsep yang terkait dengan proses pembelajaran dalam konteks pemberdayaan, khususnya pada masyarkat miskin di daerah perkotaan. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lebih lanjut bagi penelitian-penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah dan pembangunan masyarakat.